

PERSEPSI PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN KOTA PASURUAN TERHADAP KEBIJAKAN RELOKASI

Taufiq Ramdani

Universitas Mataram

Alamat Email: taufiq.ramdani@unram.ac.id

Abstract

The aim of this research is to know how street vendors response to the Relocation Policy at a square city of Pasuruan. This research employs a mixed method. A quantitative approach is the main approach, while qualitative approach is the supporting one (mixing method). To the main approach (quantitative) is represented by survey method using Spearman Rank Correlation Analysis as a tool to analyse factors that affect street vendors' interpretation to the relocation policy. The supporting approach (qualitative) is represented by "in-depth interview" using Miles and Huberman interactive analysis as a tool in answering something that be related by emic meaning perspective from research that cannot be explained through quantitative approach alone. The results show that during the introduction stage, the relation of stimulus and street vendors' response to relocation policy formed negatively. Negative interpretation shows that street vendors at the Pasuruan Town Square see relocation policy as a threat of their businesses. Factors that affect the interpretation tendency are limited knowledge on the policy consequence, hope, ability, service, facility, socialization, and ethnicity.

Keywords: *Interpretation, Street Vendors, Relocation Policy and Pasuruan Policy*

Intisari

Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi persepsi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kota Pasuruan terhadap kebijakan relokasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Desain penelitian ini adalah *Mixing Method*. Untuk pendekatan utama (kuantitatif) menggunakan metode survei, menggunakan analisis

korelasi Spearman Rank untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi. Sedangkan pendekatan pendukung (kualitatif) diwakili *in-depth-interview*, menggunakan analisis interaktif Miles&Huberman sebagai perangkat untuk menjawab aspek emik penelitian. Persepsi PKL terhadap kebijakan relokasi adalah negatif. Artinya, mayoritas PKL yaitu 60 orang (89,55 %) memaknai kehadiran kebijakan relokasi sebagai ancaman bagi kelangsungan usaha mereka. Adapun PKL yang mempersepsi positif 4 orang (5,97 %) dengan pemaknaan bahwa kebijakan relokasi merupakan peluang bagi perkembangan usaha. Sedangkan PKL yang menginterpretasi kebijakan relokasi secara ambivalens sebanyak 3 orang (4,47). Artinya PKL memaknai kebijakan relokasi dalam keraguan di antara ancaman dan peluang bagi kelangsungan dan perkembangan usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi PKL terhadap Kebijakan Relokasi adalah: (1) Faktor Pengetahuan (pengetahuan tentang konsekuensi dari kebijakan, pengetahuan tentang aturan berdagang di lokasi baru dan pengetahuan tentang strategi atau cara-cara menyiasati usaha agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan ketat di lokasi baru), (2) faktor harapan atau kemauan, (3) faktor kemampuan (kemampuan strategi-teknis, kemampuan ekonomi), (4) faktor pelayanan, (5) faktor fasilitas, (6) faktor sosialisasi, dan (7) faktor etnisitas.

Kata Kunci: Persepsi, Relokasi, Pedagang Kaki Lima dan Kebijakan Pemkot Pasuruan.

Pendahuluan

Laju kegiatan pembangunan sektor perdagangan di Provinsi Jawa Timur belakangan ini, khususnya di kota-kota satelit Surabaya seperti Kota Pasuruan mengungguli sumbangsih sektor lainnya bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi mencapai angka 3,94%, dimana sektor perdagangan menyumbang angka pertumbuhan sebesar 1,43%, sektor pengolahan industri 0,70%, serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,60%. Karakteristik pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan yang memiliki andil besar bagi pertumbuhan ekonomi wilayah di kota Pasuruan berbeda dengan yang terjadi di Jakarta dan Surabaya di mana sektor formallah yang memiliki andil terbesar, sementara di Kota Pasuruan justru sektor informallah termasuk para Pedagang Kaki Lima yang memiliki andil terbesar.

Kebijakan dan berbagai aktivitas pembangunan perdagangan sebaik apapun desain pemberdayaannya tetaplah berpotensi menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat sasaran, di samping mereka yang mempersepsi positif, dimana segenap kapasitas internal dan eksternal patut diduga akan menjadi faktor yang mempengaruhi. Jika suatu kebijakan pembangunan dirasa oleh sebagian masyarakat tidak memberi ruang, kesempatan, serta keuntungan bagi mereka maka kebijakan tersebut tentunya akan dipersepsi negatif, namun bagi mereka yang memiliki segenap sumber-daya yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi bahkan mengambil keuntungan di dalam kegiatan pembangunan tersebut maka tentunya mereka inilah yang akan mempersepsi positif kebijakan tersebut.

Kebijakan relokasi PKL alun-alun Pasuruan sejatinya merupakan upaya meminimalisir muatan negatif aktivitas PKL sekaligus upaya untuk meningkatkan nilai positifnya. Yang dimaksud sebagai nilai negatif yaitu aktivitas berdagang PKL yang sering menimbulkan kemacetan, penyalahgunaan fungsi fasilitas dan ruang-ruang publik seperti trotoar, dan alun-alun. Adapun nilai positif PKL yaitu kemampuannya di dalam menyerap tenaga kerja di tengah rendahnya kualifikasi masyarakat setempat serta sumbangsuhnya bagi pertumbuhan ekonomi kota Pasuruan.

Berangkat dari asumsi tersebut kemudian Tim Peneliti Studi Relokasi PKL Kota Pasuruan yang mana leading-sektornya Bappeda Kota Pasuruan merekomendasikan bahwa untuk alasan ketertiban, kebersihan, serta kenyamanan dan keindahan kota Pasuruan, maka tim merekomendasikan kepada Walikota Pasuruan untuk segera melaksanakan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima. Untuk mendukung pelaksanaan rekomendasi dimaksud Tim Peneliti Studi Relokasi PKL Kota Pasuruan tersebut merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Walikota dan Pemerintah Kota Pasuruan, hendaknya melaksanakan upaya penertiban dan penataan PKL secara terpadu.
2. Walikota dan Pemerintah Kota Pasuruan, hendaknya berupaya untuk memecah keramaian kota Pasuruan yang bertumpu pada satu titik, yakni di sekitar Alun-alun dan Jl. Niaga, dengan membuka pusat-pusat keramaian baru, seperti membuka pusat perdagangan (pasar) dan tempat hiburan.
3. Walikota dan Pemerintah Kota Pasuruan, hendaknya

mempersiapkan wilayah Pasar Poncol sebagai lokasi tujuan relokasi PKL, dengan cara tidak mendirikan bangunan baru atau meremajakan bangunan yang sudah ada. Atas rekomendasi tersebutlah pada tahap selanjutnya direncanakan pembangunan kembali Pasar Poncol menjadi Pasar Poncol Plaza (Mall Poncol).

Penelitian Sugiyono di tahun 2001 yang tujuannya hampir serupa dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi Pedagang Kaki Lima terhadap Kebijakan tentang Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Sidoarjo, walaupun faktanya kebijakan belum diluncurkan terlebih untuk dilaksanakan mengungkapkan bahwa bagi PKL sendiri, belum adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menetapkan Alun-alun Sidoarjo sebagai lokasi PKL secara resmi menimbulkan perasaan tidak nyaman mengingat bahwa keberlanjutan kegiatan usaha di lokasi tersebut menjadi tidak terjamin sepenuhnya. Asumsi inilah yang dianggap oleh peneliti memunculkan persepsi PKL terhadap kebijakan tentang Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Sidoarjo. Dari hasil penelitian ini terungkap bahwa sesungguhnya PKL memiliki persepsi bahwa kebijakan akan memperbaiki dan memajukan kualitas usaha mereka. Di samping itu PKL juga memiliki persepsi bahwa kebijakan akan menjadi pendukung kegiatan usaha mereka agar dapat dengan nyaman dan melakukan kegiatan usaha. Adanya kepastian hukum akan memberi suatu jaminan tertentu bahwa meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha di tempat tersebut tidak akan terhambat oleh status hukum usaha mereka.

Di kota Pasuruan sendiri kebijakan relokasi PKL sudah diluncurkan dan bahkan sudah mulai diimplementasikan, dan justru kebijakan ini dibuat guna memberi kepastian status dagang bagi PKL itu sendiri. Namun masalahnya bukanlah pada ketiadaan azas kepastian pada sisi kebijakan yang dianggap menjadi sumber kemunculan persepsi negative dan resistensi sebagaimana yang terjadi pada PKL Alun-alun Sidoarjo, melainkan pada aspek kapasitas internal dan eksternal PKL itu sendiri, yaitu seputar keadaan dan kesiapan yang melingkupi diri PKL itu sendiri, selain faktor-faktor lainnya yang tentunya melekat pada totalitas kebijakan itu sendiri seperti optimalisasi sosialisasi dan pelayanan.

Berangkat dari fakta dan fenomena yang sudah diuraikan di atas maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk meneliti dua hal yaitu: Bagaimana interpretasi Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kota Pasuruan terhadap kebijakan relokasi PKL ke Pasar Poncol Plaza dan Faktor-

faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi tersebut.

Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan eklektisisme (Mixed), adapun desain yang digunakan adalah *mixing method*, dimana paradigma kuantitatif sebagai pegangan utama, sedangkan paradigma kualitatif sebagai pendukung. Hal ini selaras dengan pendapat Moleong bahwa *mixing method* memungkinkan selama desainnya adalah memanfaatkan satu paradigma sedangkan paradigma lainnya sebagai pelengkap. Penelitian ini mengambil lokasi di seputar alun-alun Pasuruan. Alun-alun Pasuruan merupakan lokasi sentra PKL terbesar di kota Pasuruan, termasuk dalam kategori kawasan khusus yang perizinannya diatur berdasarkan keputusan Wali Kota Pasuruan.

Populasi Penelitian

Obyek populasi dari penelitian ini adalah seluruh unit PKL yang berjualan di seputar alun-alun Pasuruan dan termasuk dalam kategori PKL zona alun-alun. Besaran angka populasi mencapai 81 orang PKL.

Sampel Penelitian

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling*. Adapun untuk penentuan ukuran sampel digunakan metode *proportionate stratified random sampling* dengan rumus berikut ini:

$$n_i = \frac{N_i}{N} . n \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

n_i = Jumlah sampel menurut stratum

n = Jumlah sampel seluruhnya

N_i = Jumlah Populasi menurut stratum

N = Jumlah populasi seluruhnya

- 1. Pedagang makanan/ minuman : 41 orang
- 2. Pedagang pakaian/konveksi : 27 orang
- 3. Pedagang elektronika/assesories : 13 orang

Dari rumus di atas, diperoleh jumlah sample menurut masing-masing strata sebagai berikut:

$$N = \frac{N}{N.d^2 + 1} = \frac{8}{(8).(0,0025) + 1} = \frac{8}{1,2025} = 6,3 = 67 \text{ responden}$$

Penentuan sample berdasarkan strata dengan rumus: $n_i = N_1 / N.n$

- a. Pedagang makanan/ minuman = $41 : 81 \times 67 = 33,91 = 34$
- b. Pedagang pakaian/ konveksi = $27 : 81 \times 67 = 22,33 = 22$
- c. Pedagang elektronika/ assesories = $13 : 81 \times 67 = 10,75 = 11$

Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *mixing method*, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan paduan dari dua teknik yang saling melengkapi. Metode yang pertama yaitu metode survei dengan penggunaan angket (kuisisioner). Metode survei seperti penggunaan angket dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data/ karakteristik-karakteristik yang bersifat matematis sehingga dapat disuguhkan secara tepat dan cermat. Adapun metode observasi dan *indepth interview* digunakan untuk menggali kedalaman makna dari kecenderungan interpretasi dan respon PKL terhadap kebijakan relokasi.

Pengukuran Data

Dalam penelitian ini sebagian data primer yang didapatkan merupakan data ordinal yang berbentuk kualitatif, dimana agar data tersebut dapat diukur secara kuantitatif (analisis statistic), maka penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi sub variabel, dijabarkan lagi menjadi komponen-komponen yang dapat diukur. Komponen-komponen yang terukur ini kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang kemudian dijawab oleh PKL sebagai responden. Guna keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban-jawaban yang diperoleh dari responden akan diberi skor, jawaban setiap item mempunyai gradasi dari 1 sampai 3. Contoh skor jawaban responden adalah sebagai berikut:

1. Setuju (3)

2. Netral (2)
3. Tidak setuju (1)

Adapun untuk tujuan pengukuran data hasil penelitian seperti umur, tingkat pendidikan, pendapatan serta lain-lainnya, akan disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, sehingga dikategorikan ke dalam beberapa kategori tertentu, misalnya kategori usia dibagi menjadi kelas muda, sedang, dan tua dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{R}{I} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana:

P = Interval Kelas

R = Rentang Kelas (data terbesar - data terkecil)

I = Banyak kelas.

Uji Validitas

Guna memperoleh konstruk dan instrumen penelitian yang valid, maka dalam pendefinisian konsep yang akan diukur serta penyusunan instrumen-instrumennya peneliti terlebih dahulu menanyakan/ mengkonfirmasi hal tersebut kepada calon responden yaitu PKL Alun-alun Pasuruan. Mengacu pada pertimbangan tersebut, maka uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas eksternal, dengan membandingkan (untuk mencari kesamaan) antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Apabila telah terdapat kesamaan antara kriteria dalam instrumen dengan fakta di lapangan, maka dalam metode ini dapat dinyatakan bahwa instrumen mempunyai validitas eksternal yang tinggi.

Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan metode *test-retest (stability)*. Instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan *test-retest* dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Artinya, instrumennya sama, respondennya sama, hanya saja waktunya berbeda. Adapun reliabilitasnya diukur berdasarkan koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Apabila koefisien korelasi positif dan signifikan, itu artinya instrumen tersebut dapat dinyatakan reliabel.

Operasionalnya adalah, setelah **tersusun tabel data percobaan** tahap pertama untuk semua responden pada suatu waktu, maka kemudian dilakukan percobaan terhadap responden dengan instrumen yang sama namun di waktu yang berbeda untuk memperoleh data percobaan tahap kedua. Selanjutnya, harga skor total dari kedua tahap uji coba ke dalam tabel penolong, agar perhitungan koefisien korelasi dapat dilakukan dengan mudah.

Tahap selanjutnya, berdasarkan harga-harga / nilai-nilai pada tabel penolong, maka dengan teknik korelasi Product Moment dapat dihitung harga r_i sebagai harga untuk mengukur reliabilitas instrumen respon PKL terhadap kebijakan relokasi. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{N(\sum X_1.X_2) - (\sum X_1)(\sum X_2)}{\sqrt{(N(\sum X_1^2) - (\sum X_1)^2)(N(\sum X_2^2) - (\sum X_2)^2)}} = \dots\dots\dots(3)$$

Setelah diperoleh harga r_i hitung, maka selanjutnya untuk dapat ditentukan instrumen yang diuji/ digunakan reliabel atau tidak, harga tersebut dikonsultasikan dengan harga r_{tabel} . Apabila harga r_{hitung} (5 % atau 1 %) > r_{tabel} maka dapat ditentukan bahwa instrumen respon reliabel. Instrumen yang akan diuji reliabilitasnya adalah instrumen yang digunakan untuk mengetahui interpretasi PKL dan alokasi respon PKL terhadap kebijakan relokasi.

Analisis Kuantitatif

Analisis data dalam kegiatan penelitian ini menggunakan metode analisis statistik. Dimana perhitungan korelasi dilakukan antara variabel-variabel bebas (*independent variables*) yaitu: tingkat pengetahuan PKL tentang kebijakan relokasi, harapan PKL terhadap kebijakan relokasi, kemampuan PKL, paguyuban PKL, fasilitas, sosialisasi relokasi, pelayanan dan etnisitas terhadap *dependent variables* (variabel terikat) yaitu interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi, melalui penggunaan rumus korelasi Spearman Rank, dimana ciri khasnya adalah sumber data untuk variabel yang akan dikorelasikan berasal dari sumber tidak harus sama, jenis data yang dikorelasikan berupa data ordinal atau berjenjang atau ranking, serta data dari kedua variable bebas distribusi/tidak harus membentuk distribusi normal.

Data yang dikumpulkan, ditabulasikan dan kemudian dianalisis. Analisis data digunakan dalam menjawab dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan menggunakan uji korelasi Spearman Rank,

dengan rumus:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)} \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan:

r_s = koefisien korelasi peringkat Spearman

d_i = selisih antara peringkat X_i dan Y_i

n = banyaknya pasangan data

Oleh karena jumlah sampel (n) dalam penelitian ini melebihi nilai-nilai yang dicantumkan dalam tabel-tabel Rho yaitu sebesar 67 responden, maka pengujian hipotesis diterima atau ditolak ditentukan berdasarkan ketentuan berikut:

$H_0: \rho = 0$ (Tidak ada kesesuaian/ hubungan)

$H_a: \rho \neq 0$ (Ada hubungan/ kesesuaian)

Analisis Kualitatif

Dimensi analisis kualitatif dalam penelitian ini akan menyertai analisis data kuantitatif untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan makna, konteks, dan perspektif emik yang terkandung dari berbagai kecenderungan-kecenderungan yang telah diperoleh dengan metode survei. Adapun karakteristik analisis data deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini diangkat dari analisis data Mile dan Huberman (1992) berupa analisis data interaktif yang berlangsung sejak awal dan sepanjang proses penelitian yang operasionalnya melalui tahapan-tahapan berikut yaitu: *Data Collecting, Data Display, Data Reduction, Conclusion/ Verification*.

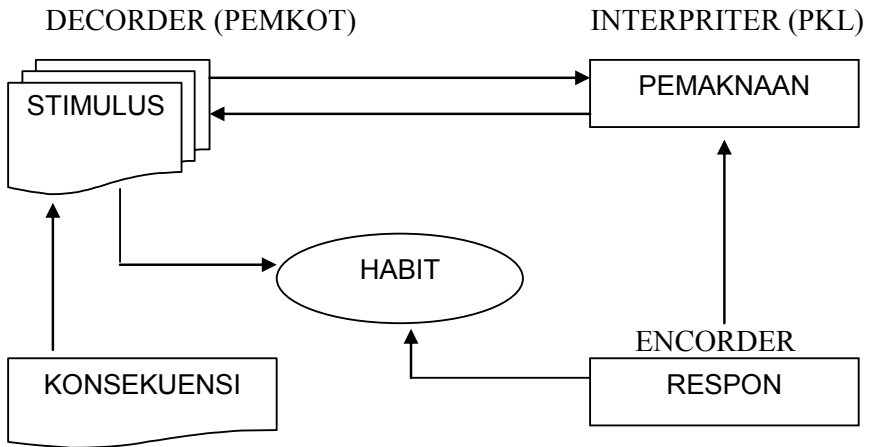
Interpretasi

Seseorang tidaklah secara langsung memberi respon terhadap suatu stimulus melainkan terlebih dahulu diantarai oleh suatu proses berfikir untuk memberi makna atau penafsiran terhadap stimulus tersebut (interpretasi). Blummer (1969) menyatakan bahwa "interaksi manusia dijabatani oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, oleh kepastian dari makna-makna (interpretasi). Setiap individu mempunyai kemampuan dalam memaknai stimulus seperti memaknai situasi-situasi individual, situasi dan isu-isu sosial, benda-benda dan obyek sikap atau respon lainnya secara simbolik. Ini berarti bahwa sebelum terbentuk makna, suatu stimulus mentah (*distal stimuli*) selalu dijabatani oleh penafsiran atau interpretasi manusia. Tradisi sosiolog

interaksionisme simbolik menekankan bahwa setiap makna tersusun secara sosial (*socially reconstructed*). Suatu makna berdasarkan takrif (*definition*) dan tafsir (*interpretation*) yang mereka berikan. Perilaku ataupun respon manusia mencakup apa yang mereka katakan dan apa yang mereka kerjakan pada dasarnya merupakan hasil dari penafsiran para pelaku dari dunianya. Oleh karena itu, tugas dari seorang peneliti yaitu menerapkan orientasi teoritis untuk menangkap proses penafsiran atau interpretasi. Peneliti dituntut memiliki dan menggunakan kemampuan mereproduksi interpretasi, dorongan dan pemikiran yang ada di belakang perilaku atau respon seseorang. Dengan ungkapan lain, peneliti berupaya melihat segala sesuatu berdasarkan sudut pandang seseorang.

Oleh karena setiap pembahasan terhadap interpretasi selalu dikaitkan dengan respon seseorang, maka pengertian tentang interpretasi itu sendiri selalu menyertakan aspek wawasan, perasaan dan kecenderungan-kecenderungan perilaku yang terkait dengan kondisi biologis-psikologis, lingkungan sosial dan berbagai kondisi-kondisi internal dan eksternal yang melingkupi seseorang. Berlo dalam Santoso (2000) memberikan pengertian bahwa interpretasi merupakan kondisi seseorang yang memberikan arti kepada sesuatu yang ditujukan kepadanya (*stimulus*), interpretasi dapat terjadi dalam dua tahap yaitu seseorang mengamati terlebih dahulu apa yang menjadi obyek responnya dan kemudian berdasarkan berbagai kapasitas kognitif dan afektifnya seperti tingkat pengetahuan dan pengalaman, ia menentukan atau memberikan arti terhadap apa yang diamatinya. Berlo menjelaskan lebih lanjut bahwa interpretasi juga merupakan proses mental yang terjadi pada seseorang individu setelah ia menerima atau mengamati suatu stimulus.

Proses penginterpretasian suatu obyek respon tergambar sebagai berikut:



Gambar 1. Hubungan komunikasi dan interpretasi

Pedagang Kaki Lima

Menurut Bromley dalam Tadjuddin Noer dan Manning (1985) PKL adalah seorang wiraswasta yang independen dan berusaha sendiri yang keberhasilannya tergantung pada usaha dan kemampuannya untuk menarik pelanggan. Lokasi usahanya bergantung pada pusat-pusat keramaian, di pinggir-pinggir jalan dan sudut-sudut kota yang lahannya secara umum tidak dimiliki secara legal dan bersifat non permanen. Kementerian Bidang Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi mendefinisikan Pedagang Kaki Lima sebagai perorangan yang tidak memiliki bentuk badan usaha dan tempat usaha tetap yang melakukan kegiatan perdagangan. Pada umumnya pedagang informal seperti PKL memiliki beberapa ciri spesifik antara lain: 1) mendasarkan diri pada sumber daya lokal, 2) usaha secara kekeluargaan, 3) usaha berskala kecil, 4) bersifat padat karya, 5) teknologi yang digunakan bersifat sederhana dan adaptif 6) keahlian diperoleh dari luar pendidikan formal, 7) tidak ada proteksi resmi dalam proses produksinya dan 8) pasarnya bersifat kompetitif.

PKL dalam penelitian ini didefinisikan dalam konteks faktual dan terkait dengan definisi yang diacu oleh Pemkot Pasuruan sebagai pihak yang membawahi PKL sekitar alun-alun dan pasar Poncol, yaitu dalam pengertian sebagai pedagang yang melakukan perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup yang menggunakan sebagian fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usahanya baik menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Subyek dari pengertian tersebut adalah para PKL yang

berdagang di seputar alun-alun dan pasar Poncol Pasuruan yang ditetapkan sebagai PKL kawasan tertentu.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Interpretasi

Di dalam dan di luar diri setiap individu terdapat perbedaan-perbedaan internal dan eksternal yang menyangkut tingkat pengetahuan, kesiapan (pengalaman), kepentingan dan harapan seseorang. Perbedaan-perbedaan internal dan eksternal tersebut terkait dengan kondisi psikologis, biologis, serta kondisi sosial-ekonomi yang kemudian mempengaruhi bentuk interpretasi seseorang terhadap suatu stimulus yang dihadapi.

Kesemua komponen-komponen eksternal dan internal yang melingkupi diri seseorang merupakan kesatuan sistem yang saling memiliki keterkaitan peran dan pengaruh satu sama lain, walaupun dalam bentuk yang tidak linier. Kesemua aspek tersebut di atas, sebelum sampai pada pilihan bentuk respon terlebih dahulu menjadi suatu kesatuan unsur yang mempengaruhi proses interpretasi stimulus.

Menurut Ahmadi (2002) ada dua ukuran yang menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi seseorang sehingga akan mempengaruhi interpretasi dan responnya yaitu Kognitif dan Afektif.

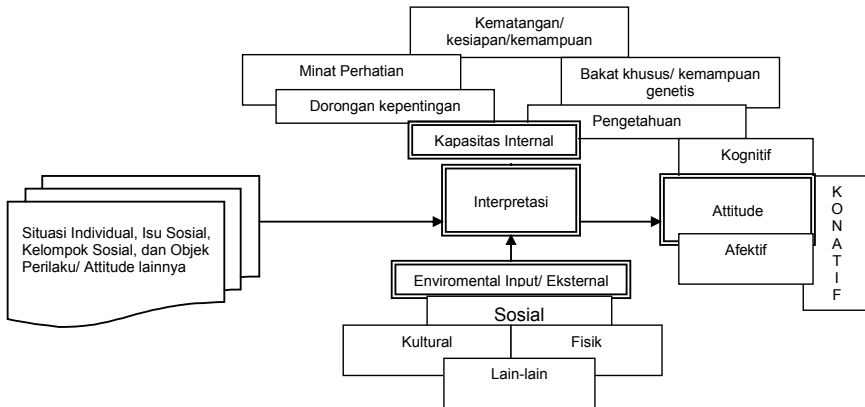
Interpretasi tidak pernah terbatas atas suatu obyek. Rosenau (1997) mengakui bahwa interpretasi yang tidak terbatas atas suatu obyek adalah sangat mungkin, karena seseorang tidak akan pernah dapat mengatakan apa yang diniatkan dengan bahasa (secara utuh), yang pada akhirnya semua makna suatu obyek, semua interpretasi adalah tidak pasti. Karena tidak ada makna final untuk tanda khusus tertentu, tidak ada pengertian tunggal atas suatu obyek pengamatan atau respon, maka seorang peneliti hendaknya melihat bahwa tidak ada interpretasi yang dapat lebih unggul dari yang lain.

Sebagaimana halnya taksonomi perilaku yang mencakup tiga kawasan, yaitu kawasan kognitif, afektif dan psikomotorik, maka interpretasi sebagai proses pengantara stimulus dan respon juga memiliki kawasan yang mempengaruhinya yang terkait dengan taksonomi di atas. Rosenau (1997) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi seseorang mencakup segenap komponen yang membentuk dan berinteraksi dengan komponen kognitif dan afektif orang tersebut. Dengan demikian, domainnya bisa terletak di dalam diri *interpeter/mufassir* maupun di luar dirinya.

Mengacu pada pernyataan Rosenau, maka faktor-faktor

yang mempengaruhi interpretasi seseorang terletak pada semua hal yang mempengaruhi kognitif dan afektifnya, seperti pengetahuan, kepentingan, kesiapan atau kemampuan, posisi dan interaksi dengan lingkungan internal dan eksternalnya.

Secara sistematis kiranya dapat digambarkan secara visual tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi menurut Rosenau berikut ini:



Gambar 2. Hubungan Stimulus, Interpretasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta perilaku yang dihasilkan

Teori Interaksionisme Simbolik

Interaksionisme simbolik di dalam mengamati tindakan seseorang tidak secara mutlak dipandang sebagai tindakan yang disebabkan oleh “kekuatan dalam” sebagaimana kaum Reduksionis Psikologis, tidak juga dipandang sebagai tindakan yang disebabkan oleh “kekuatan luar” sebagaimana fahamnya fungsionalis dan konflik, namun dikaji dalam paradigma bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang lahir dan disebabkan oleh manusia sendiri dengan kemampuan berfikirnya membentuk obyek, menilai sesuatu, memberi makna (menginterpretasi) dan memutuskan untuk berbuat berdasarkan makna tersebut.

Oleh karena alasan tersebut di atas, teori interaksionisme simbolik merupakan teori yang oleh beberapa teoritikus dianggap sebagai teori yang lebih mengedepankan potensi internal (pikiran, jiwa dan hati) manusia, dimana diri-Jiwa manusia dianggap sebagai sentra dalam proses sosial. Dengan asumsi tersebut teori interaksionisme simbolik dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis atas interpretasi

PKL terhadap kebijakan relokasi. Esensi dari pernyataan-pernyataan tentang interaksionisme simbolik di atas dapat direpresentasikan dari pernyataan Abraham (1982) berikut ini:

Symbolic interactionism is essentially a social-psychological perspective that is particularly relevant to sociological enterprise. Instead of dealing with abstract social structures, concrete forms of individual behavior or inferred psychic characteristics, symbolic interactionism focuses on the nature of interaction, the dynamic patterns of social action and social relationship. Interaction itself is taken as the unit of analysis: attitudes are relegated to the back-ground. Both the human being and the social structure are conceptualized as more complex, unpredictable and active than in the conventional sociological perspective. Societies are composed of interacting individuals who not only react but perceive, interpret, act and create.

Teori Strukturasi

Kutipan berikut ini merupakan komentar Bryant dan David Jary (2001) mengenai definisi sentral dari teori strukturasi yang terkandung di dalam karya Giddens:

"Giddens affirms the structuration theory is the label he attaches to his concern to develop an ontological framework for the study of human social activities. Sociology here refers to a conceptual investigation of the nature of human action, social institutions, and the interrelations between action and institutions.

Kutipan di atas memuat pengertian bahwa teori strukturasi merupakan teori yang mencoba membangun konsep baru tentang hubungan antara "pelaku" (*action*) dan "struktur" (institusi) yang sifatnya menengahi peran pelaku dan struktur. Fokus pembahasannya yaitu usaha memahami *agency* manusia dan lembaga-lembaga sosial. Hubungan antara pelaku dan struktur dalam perspektif strukturasi Giddens merupakan bentuk dualitas, bukan dualisme. Giddens menamai teorinya strukturasi (*theory of structuration*) dengan landasan pijak teoritis yang menepis dualisme (pertentangan), Giddens mengajukan gagasan dualitas (timbang-balik) antara pelaku dan struktur. Bersamaan dengan sentralitas waktu dan ruang, dualitas pelaku dan struktur menjadi dua tema sentral yang menjadi poros dari strukturasi. Dualitas berarti, tindakan dan struktur saling mengandaikan.

Dalam paradigma strukturasi Giddens, struktur bukanlah realitas yang berada di luar pelaku seperti dipahami oleh Durkheim dan diteruskan oleh strukturalisme. Struktur adalah aturan dan

sumber daya (*rules and resources*) yang mewujud pada saat diaktifkan oleh pelaku dalam suatu praktek sosial. Dalam arti ini, struktur tidak hanya mengekang (*constraining*) atau membatasi pelaku, melainkan juga memungkinkan (*enabling*) terjadinya praktek sosial.

Sementara itu, sentralitas waktu dan ruang diajukan untuk memecah kebuntuan statik/ dinamik, sinkroni/ diakroni, atau stabilitas dan perubahan. Dualisme seperti ini terjadi karena waktu dan ruang biasanya diperlakukan sebagai panggung atau konteks bagi tindakan.

Terkait dengan strukturasi pada level pelaku, maka strukturasi yang terjadi pada tingkat pelaku diklasifikasikan ke dalam strukturasi yang terjadi pada tingkat pelaku individual dan strukturasi yang terjadi pada kondisi di mana individu-individu pada tingkat tertentu bertindak secara terorganisir. Dalam terminologi teori strukturasi Giddens, persoalan strukturasi yang mana individu-individu pada tingkat tertentu bertindak secara terorganisir (masyarakat), maka terinspirasi oleh teori Erving Goffman, Giddens mendefinisikan masyarakat sebagai perjumpaan antar individu yang terus menerus. Perjumpaan diatur oleh mekanisme-mekanisme dualitas pelaku dan struktur. Kemudian, memaknai teori waktu geografi Hagerstrand, Giddens menerangkan bahwa perjumpaan terjadi karena konvergensi waktu-ruang, dan mobilisasi waktu-ruang merupakan poros eksistensi masyarakat.

Interpretasi PKL terhadap Kebijakan Relokasi

Interpretasi dalam penelitian ini berkaitan dengan pemaknaan PKL terhadap keberadaan kebijakan relokasi terhadap dirinya sebagai Pedagang Kaki Lima yang akan menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi terpola ke dalam tiga bentuk, yang *pertama* yaitu interpretasi positif, yaitu interpretasi yang memaknai kebijakan relokasi sebagai peluang untuk mengembangkan usaha. *Kedua* interpretasi negatif, yaitu interpretasi yang memaknai kebijakan relokasi sebagai ancaman bagi kelangsungan usaha. Dan *ketiga* interpretasi ambivalens, yaitu interpretasi yang memaknai kebijakan relokasi di antara peluang dan ancaman bagi pengembangan dan kelangsungan usaha karena masih dalam posisi menunggu perkembangan kebijakan relokasi.

Berikut ini adalah hasil penelitian tentang interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi:

Berdasarkan alokasi interpretasi yang ditunjukkan melalui hasil survei dalam penelitian ini terungkap bahwa mayoritas PKL alun-alun Pasuruan memaknai kebijakan relokasi sebagai ancaman bagi

kelangsungan usaha mereka (interpretasi negatif). Adapun alokasi interpretasi tersebut, yaitu sebesar 89,55 % (60 orang) memaknai kebijakan relokasi sebagai ancaman bagi kelangsungan usaha, sebesar 4,47 % (3 orang) memaknai kebijakan relokasi di antara peluang dan ancaman bagi perkembangan dan kelangsungan usaha karena dalam posisi menunggu perkembangan kebijakan, dan sebesar 5,97 % (4 orang) memaknai kebijakan relokasi sebagai peluang bagi perkembangan usaha mereka. Nilai rata-rata skor interpretasi 1,24. Skor realitas interpretasi PKL berjumlah 78, skor maksimal 201, skor minimal 67. Dengan demikian, interpretasi PKL terhadap relokasi berada dalam kategori negatif.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil olah data tentang dampak yang ditimbulkan oleh kecenderungan interpretasi terhadap kecenderungan respon terungkap, bahwa komponen-komponen stimulus (item-item kebijakan relokasi) secara bersama-sama menjadi obyek pengamatan yang memunculkan interpretasi negatif PKL terhadap kebijakan relokasi. Namun ada satu kecenderungan negatif bahwa item kebijakan biaya dan harga stand menjadi titik sentral sumber interpretasi negatif PKL. Adapun tata urutan berdasarkan titik pengamatan terhadap stimulus yang menghasilkan interpretasi negatif PKL terhadap kebijakan relokasi yang diukur berdasarkan persentase alokasi respon adalah (1) Kebijakan Biaya dan Harga Stand, (2) Kebijakan Retribusi, (3) Kebijakan Tata Cara Pembayaran, (4) Kebijakan Pengaturan Lokasi dan Pasisi Stand, (5) Kebijakan Waktu relokasi.

Mayoritas PKL menginterpretasi kebijakan relokasi sebagai ancaman bagi kelangsungan usaha mereka didasarkan pada suatu kenyataan, bahwa di antara sederetan konsekuensi kebijakan relokasi mengarahkan mereka lebih pada penalaran dampak negatif kebijakan. Ketika nilai positif kebijakan relokasi tidak teratasi karena kendala kemampuan, maka berganti nilai negatif atau dampak buruknya yang menjadi sorotan pemaknaan. Dengan demikian lahirlah interpretasi yang menyatakan bahwa kebijakan relokasi merupakan ancaman bagi kelangsungan usaha. Ketika persyaratan kesertaan tidak dapat dipenuhi oleh PKL (Kebijakan Biaya dan Harga Stand) maka simbol-simbol pemberdayaan yang menjadi tujuan dari kebijakan relokasi dimaknai sebaliknya oleh PKL.

Penelitian ini menunjukkan bahwa asumsi mendasar yang mendorong lahirnya interpretasi negatif PKL terhadap kebijakan relokasi (sebagai ancaman bagi kelangsungan usaha) adalah ketidakberdayaan PKL dalam menangkap peluang pengembangan usaha di tempat tujuan

relokasi. Kendala internal interpreter (PKL) adalah faktor kemampuan ekonomi, sedangkan kendala internal stimulus adalah kebijakan biaya dan harga stand yang dinilai terlampau tinggi.

Pada posisi yang berseberangan, asumsi mendasar yang mendorong lahirnya interpretasi positif dari beberapa orang PKL adalah kemungkinan untuk mendapat peluang memaksimalkan kegiatan usaha di tempat tujuan relokasi. Faktor lingkungan internal PKL yaitu kurangnya rasa aman turut mendorong kecenderungan interpretasi positif, dan jaminan keamanan di lokasi tujuan merupakan komponen stimulus yang menarik interpretasi positif.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Interpretasi PKL terhadap Kebijakan Relokasi

Sebagaimana diutarakan Ahmadi (2002) bahwa antara stimulus dan respon/ reaksi terdapat proses secara sadar untuk menginterpretasi atau memaknai dan menilai stimulus-stimulus tersebut. Jadi antara stimulus dan respon terdapat sesuatu yang disisipkan yaitu sesuatu yang berwujud pertimbangan-pertimbangan/penilaian-penilaian terhadap stimulus yang berujung pada bentuk interpretasi. Interpretasi terhadap stimulus bukan hal yang berdiri sendiri, tetapi merupakan sesuatu yang erat hubungannya dengan cita-cita seseorang, keinginan-keinginan atau harapan-harapannya, tingkat pengetahuannya tentang stimulus dan konsekuensi dari respon yang diambilnya, kemampuannya, peraturan-peraturan kemasyarakatan/kelompok yang mengikatnya dan sebagainya.

Dalam mencermati hasil penelitian ini, yaitu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi PKL, maka di dalam memahami alokasi faktor-faktor internal dan eksternal yang diduga mempengaruhi interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi yaitu menghindari kesimpulan yang menghubungkan secara linier antara realitas tersebut terhadap realitas interpretasi. Sebab, alokasi faktor-faktor internal dan eksternal PKL, positif maupun negatif tidak secara otomatis mengarahkan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi berdasarkan alokasi faktor tersebut. Berikut ini uraian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi:

Faktor Pengetahuan

Berdasarkan hasil survei terhadap komunitas PKL Alun-alun Pasuruan terungkap, bahwa secara signifikan pengetahuan PKL

tentang hal-hal yang terkait dengan keperluan relokasi adalah tidak memadai. Kenyataan tersebut ditunjukkan oleh kesenjangan nilai persentase pada masing-masing item. Untuk kategori pengetahuan tentang konsekuensi relokasi yang didasarkan pada pengetahuan tentang kebijakan pembatasan lokasi berdagang yang akan mulai diberlakukan Pemkot Pasuruan pasca beroperasinya Mall Poncol hanya diketahui oleh 14,92 % atau 10 orang PKL. Adapun PKL yang memiliki pengetahuan cukup memadai tentang hal tersebut sebanyak 9 orang atau sebesar 13,43 %, dan yang memiliki pengetahuan yang kurang memadai sebanyak 48 orang (71,64 %).

Adapun hasil uji korelasi yang menguji ada tidaknya hubungan antara tingkat pengetahuan PKL tentang konsekuensi tersebut dengan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,344 dengan nilai signifikansi 0,004. Oleh karena nilai signifikansi $< 0,05$, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan PKL tentang kebijakan lokasi dagang PKL pasca beroperasinya Mall Poncol dengan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi. Nilai koefisien korelasi yang positif menunjukkan hubungan yang positif pula, yaitu semakin memadai pengetahuan PKL tentang konsekuensi kebijakan, maka semakin positif interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi.

Selanjutnya, untuk indikator pengetahuan yang diukur berdasarkan tingkat pengetahuan PKL tentang aturan-aturan berdagang di Mall Poncol nantinya, maka mayoritas PKL yaitu sebesar 65,70 % atau sebanyak 44 orang mengaku kurang mengetahui hal tersebut. PKL yang mengaku memiliki tingkat pengetahuan yang cukup memadai sebesar 23,90 % atau sebanyak 16 orang, sedangkan yang mengaku memiliki pengetahuan yang memadai hanya sebanyak 7 orang (10,40 %).

Dalam kasus penelitian ini, pengetahuan tentang aturan berdagang di Mall Poncol oleh PKL adalah suatu alat untuk mengukur sejauhmana seorang PKL memiliki kesiapan-kesiapan strategi dan psikologis untuk menyongsong iklim dagang yang berbeda dengan kondisinya saat ini. Apabila seorang PKL telah mengetahui aturan-aturan berdagang di Mall Poncol, maka ia akan mengevaluasi kemampuan dirinya dan melakukan berbagai pertimbangan terkait dengan konsekuensi-konsekuensi dari respon yang akan diberikannya. Hasil dari berbagai evaluasi dan pertimbangan tersebut akan membentuk interpretasi, dan dari interpretasi tersebut terbentuklah suatu respon, baik respon afektif, kognitif, maupun konatif.

Uji korelasi atas faktor ini terhadap interpretasi PKL menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,341 dengan nilai signifikansi 0,005. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien korelasi positif, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan PKL tentang aturan-aturan berdagang di Mall Poncol dengan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi.

Adapun tingkat pengetahuan yang diukur berdasarkan kepemilikan informasi tentang strategi atau cara-cara menyiasati usaha agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan ketat seperti di Mall Poncol, maka sebanyak 49 orang PKL atau sebesar 73,10 % mengaku memiliki pengetahuan yang kurang memadai tentang hal tersebut. Adapun yang mengaku memiliki pengetahuan cukup memadai sebanyak 13 orang (19,40 %), dan yang memiliki pengetahuan memadai hanya 5 orang atau sebesar 7,50 %. Uji korelasi atas faktor ini terhadap interpretasi menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,317 dengan nilai signifikansi 0,009. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan PKL tentang strategi atau cara-cara menyiasati usaha agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan ketat dengan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi.

Faktor Harapan atau Kemauan

Berdasarkan analisis statistik terhadap faktor ini, maka hasil uji korelasi menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,272 dengan nilai signifikansi sebesar 0,026 pada pengujian dua ekor dengan kasus berjalan 67. Oleh karena nilai signifikansi di bawah 0,05 dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara faktor harapan atau kemauan PKL dengan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi (hipotesis alternatif diterima). Mengacu pada nilai koefisien korelasi yang positif, maka dapat disimpulkan pula bahwa hubungan antara kedua variabel adalah positif pula. Artinya semakin positif harapan PKL, maka semakin positif pula interpretasinya terhadap kebijakan relokasi.

Harapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harapan yang menunjukkan keselarasan substansial dengan interpretasi dan respon PKL terhadap kemunculan kebijakan relokasi. Sebagai contoh, harapan "agar pemerintah memberi bantuan pengembangan usaha bagi PKL yang direlokasi" cenderung muncul dari mereka yang memaknai kebijakan relokasi sebagai peluang bagi pengembangan usaha dan yang bersedia atau setuju direlokasi. Adapun harapan

negatif yaitu “agar pemerintah memberikan kompensasi ganti rugi bagi PKL yang tidak bersedia direlokasi” cenderung muncul dari mereka yang menginterpretasi kebijakan relokasi sebagai ancaman bagi kelangsungan usaha dan yang menolak atau tidak setuju direlokasi. Adapun alokasi harapan tersebut terpolo sebagai berikut: harapan pada biaya kompensasi ganti rugi bagi PKL yang tidak turut serta dalam relokasi dinyatakan oleh 42 orang (63,70 %), harapan pengurangan biaya kesertaan dalam relokasi dinyatakan oleh 19 orang PKL (28,4 %), dan harapan biaya pengembangan usaha bagi PKL yang turut serta dalam relokasi dinyatakan oleh 6 orang (9 %).

Faktor Kemampuan

Berikut hasil survei terhadap tingkat kemampuan PKL (strategi-teknis, ekonomi, sosial) dan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi:

Strategi Dagang

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas PKL alun-alun Pasuruan yaitu sebanyak 45 orang (67,20%) tidak mensiasati strategi dagang sama sekali dalam kegiatan usahanya guna menarik pembeli. Adapun yang mensiasati dengan pilihan strategi, maka mayoritas dari mereka yaitu 22,40% atau sebanyak 15 orang hanya menggunakan strategi pelayanan. Sebab, penggunaan strategi harga akan mendatangkan tentangan dari pedagang lain dan akan mendatangkan teguran dari paguyuban. Intinya, penggunaan strategi di luar strategi pelayanan akan menghasilkan konflik. Beberapa PKL dari etnis minoritas pedagang alun-alun menyatakan bahwa mereka masing-masing hampir pernah mengalami tekanan dan intimidasi karena penggunaan strategi harga. Dengan alasan demikian, maka kebanyakan PKL alun-alun Pasuruan menghindari strategi harga seperti penurunan harga yang drastis dan lebih mengutamakan pendekatan pelayanan atau kualitas barang.

Adapun PKL yang memadukan antara dua jenis strategi dagang sekaligus, maka mereka lebih memilih memadukan antara strategi pelayanan dan kualitas barang dagangan. PKL lebih menghindari strategi harga dengan alasan yang telah dikemukakan di atas. Jumlah mereka inipun sangat kecil yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 10,40%.

Untuk hasil uji korelasi antara kemampuan strategi PKL dengan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,287 dengan nilai signifikansi 0,018. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara strategi dagang yang digunakan PKL dengan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi.

Lokasi Berdagang

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas PKL Alun-alun Pasuruan yaitu sebanyak 48 orang (71,60%) menilai lokasi usahanya saat ini (Alun-alun Pasuruan) lebih strategis dibandingkan lokasi tujuan relokasi. Adapun PKL yang menilai sama-sama strategis antara lokasi usaha saat ini dengan lokasi tujuan relokasi sebanyak 12 orang (17,90%). Sedangkan yang menilai lebih strategis lokasi tujuan sebanyak 7 orang (10,40%). Adapun Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara kedua variabel sebesar 0,314 dengan nilai signifikansi 0,010. Dengan hasil demikian dapat disimpulkan ada hubungan yang positif antara faktor lokasi dagang dengan interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa PKL terungkap bahwa penilaian negatif mereka terhadap letak lokasi tujuan yaitu Mall Poncol didasarkan pada analisis keselarasan pangsa pasar dan nuansa lokasi. Mayoritas pangsa pasar PKL alun-alun Pasuruan adalah peziarah makam Kiyai Hamid dan jamaah pengajian akbar Masjid Agung Pasuruan. Naik turunnya jumlah kunjungan pembeli sangat dipengaruhi oleh tingkat kepadatan aktivitas di kedua tempat tersebut. Bahkan, gerak sarana transportasi di kota Pasuruan akan melebihi batas jam operasional biasanya di saat adanya pengajian akbar di Masjid Agung. Dengan analisis demikian, nuansa lokasi tujuan yaitu Mall Poncol, oleh mayoritas PKL dianggap tidak memberi daya tarik bagi pangsa pasar mereka selama ini. Bahkan dinilai akan menjadi simbol lokasi “maksiat” yang akan dihindari pangsa pasar.

Ekonomi

Untuk uji korelasi yang dilakukan terhadap faktor kemampuan ekonomi dengan interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi, yaitu untuk variabel jenis usaha menghasilkan koefisien $r_s = 0,350$ dengan signifikansi 0,004. Dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan koefisien korelasi yang positif maka dapat dinyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara jenis usaha PKL dengan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi.

Mayoritas PKL Alun-alun Pasuruan adalah pedagang makanan/ minuman yaitu sebanyak 34 orang (50,74%), pedagang pakaian/

konveksi 22 (32,83), dan pedagang elektronika 11 (16,41%). Hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara jenis usaha dengan interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi menunjukkan bahwa interpretasi negatif terpola menurut jenis barang dagangan PKL. Ada suatu kecenderungan yang signifikan, bahwa interpretasi positif terhadap relokasi lebih banyak merupakan pedagang pakaian/ konveksi, sedangkan interpretasi negatif mayoritas pedagang elektronika (VCD-Kaset), serta pedagang makanan/ minuman. Realitas alokasi interpretasi tersebut menunjukkan tuntutan keselarasan barang dagangan dengan lokasi tujuan relokasi. Nilai rata-rata interpretasi pedagang makanan/ minuman sebesar 1,125, pedagang elektronika (VCD-Kaset)/ assesories sebesar 1, dan pedagang pakaian/ konveksi sebesar 1,57. Dengan demikian nilai rata-rata interpretasi tertinggi terletak pada kategori usaha pakaian/ konveksi.

Hasil survei yang ditunjukkan oleh tabel distribusi pendapatan bersih PKL per hari memang menunjukkan rendahnya pendapatan bersih usaha mereka. Rata-rata keuntungan bersih PKL per harinya hanya berkisar pada < Rp.50.000.- yaitu sebanyak 50 orang (62,2%). Untuk yang berpenghasilan bersih antara Rp.50.000.- s/d Rp.100.000,- per hari 12 orang (26,7%). Sedangkan untuk PKL yang berpenghasilan > Rp.100.000,- per hari hanya berjumlah 5 orang (11,1%). Dengan demikian, distribusi pendapatan bersih PKL per hari dapat digunakan untuk menduga kemungkinan alokasi interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi, begitu pula sebaliknya.

Adapun hasil uji korelasi untuk tingkat pendapatan bersih dengan interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi menghasilkan hipotesis positif. Koefisien korelasi $r_s = 0,279$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,022. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendapatan bersih PKL per hari dengan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi (terima H_1). Artinya semakin tinggi tingkat pendapatan bersih PKL per hari, maka semakin positif interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi (memaknai kebijakan relokasi sebagai peluang pengembangan usaha) Nilai rata-rata interpretasi tertinggi terletak pada tingkat pendapatan bersih di atas Rp.100.000,- per hari yaitu sebesar 2,33 dan nilai rata-rata interpretasi terendah teletak pada tingkat pendapatan bersih di bawah Rp.50.000,- per hari yaitu sebesar 1.

Terkait dengan modal awal usaha, maka mayoritas PKL Alun-alun Pasuruan yaitu sebanyak 42 orang (62,70%) bermodal usaha

minim yaitu di bawah Rp.1.000.000,-. Adapun yang bermodal usaha menengah yaitu Rp.1.000.000,- s/d Rp.3.000.000,- sebanyak 17 orang (25,40 %). Sedangkan yang bermodal besar yaitu di atas Rp.3.000.000,- sebanyak 6 orang (11,90 %).

Adapun hasil uji korelasi untuk variabel modal usaha menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,259 dengan nilai signifikansi sebesar 0,035. Oleh karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien korelasi yang positif maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara modal usaha PKL dengan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi (tolak Hipotesis nol). Hasil uji korelasi ini menunjukkan bahwa interpretasi positif dan negatif terhadap kebijakan relokasi tersebar menurut tiga tingkatan modal usaha. Artinya, tinggi rendah modal usaha PKL mempengaruhi positif dan negatifnya interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi, atau naik turunnya nilai satu variabel mempengaruhi gerak variabel lainnya. Nilai rata-rata interpretasi tertinggi terletak pada kategori modal usaha di atas Rp.3.000.000,- yaitu sebesar 1,8 dan terendah terletak pada kategori usaha di bawah Rp.1.000.000,- yaitu sebesar 1,01.

Terkait dengan tingkat pendapatan keluarga, maka hasil survei menunjukkan angka yang sama dengan hasil survei terhadap modal usaha PKL di atas, yaitu sebanyak 42 orang PKL (62,70 %) berpenghasilan di bawah Rp.750.000,- per bulan. Adapun yang berpenghasilan Rp.750.000,- s/d Rp.1.500.000,- sebanyak 19 orang (28,40 %), dan yang berpenghasilan di atas Rp.1.500.000,- sebanyak 7 orang (9 %). Hasil uji korelasi antara tingkat pendapatan keluarga PKL dengan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,376 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Oleh karena nilai signifikansi di bawah 0,05 dan nilai koefisien korelasi adalah positif, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendapatan keluarga PKL dengan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi. Artinya, semakin tinggi tingkat pendapatan keluarga PKL, maka semakin positif interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi.

Tabel-tabel berikut ini akan menyajikan alokasi interpretasi berdasarkan faktor kemampuan ekonomi PKL:

Jenis Usaha

Tabel 18. Alokasi Interpretasi Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Interpretasi Positif		Interpretasi Ambivalens		Interpretasi Negatif	
	Jumlah (orang)	Persen-tase	Jumlah (orang)	Persen-tase	Jumlah (orang)	Persen-tase
Makanan/Minuman	-	-	1	1,49	33	49,25
VCD-Kaset/Assesories	-	-	2	2,98	9	13,43
Pakaian / Konveksi	4	5,97	-	-	18	26,86

Modal Usaha

Tabel 19. Alokasi Interpretasi Berdasarkan Distribusi Modal Usaha.

Modal Usaha	Interpretasi Positif		Interpretasi Ambivalens		Interpretasi Negatif	
	Jumlah (orang)	Persen-Tase	Jumlah (orang)	Persen-tase	Jumlah (orang)	Persen-tase
<Rp.1 Juta	-	-	-	-	47	70,14
Rp.1 s/d 3 Juta	1	1,49	2	2,98	8	11,19
>Rp.3 Juta	3	6,66	1	1,49	5	7,46

Pendapatan Usaha (Laba Bersih/Hari)

Tabel 20. Alokasi Interpretasi Berdasarkan Tingkat Perolehan Laba Bersih/Hari

Laba Bersih	Interpretasi Positif		Interpretasi Ambivalens		Interpretasi Negatif	
	Jumlah (orang)	Persen-tase	Jumlah (orang)	Persen-tase	Jumlah (orang)	Persen-tase
>Rp.100.000,-	4	8,88	-	-	1	1,49
Rp.50.000 s/d Rp.100.000,-	-	-	2	4,44	10	22,22
<Rp.50.000,-	-	-	1	2,22	49	73,13

Pendapatan Keluarga

Tabel 21. Alokasi interpretasi Berdasarkan Tingkat Pendapatan Keluarga

Pendapatan Keluarga	Interpretasi Positif		Interpretasi Ambivalens		Interpretasi Negatif	
	Jumlah (orang)	Persentase	Jumlah (orang)	Persentase	Jumlah (orang)	Persentase
<Rp.750.000,-	-	-	-	-	42	62,70
Rp.750.000,- s/d Rp.1.500.000,-	1	1,49	2	2,98	16	23,88
>Rp.1.500.000,-	4	5,97	1	1,49	2	2,98

Faktor Sosial:

Usia

Tabel 22. Alokasi Interpretasi Berdasarkan Usia

Usia PKL	Interpretasi Positif		Interpretasi Ambivalens		Interpretasi Negatif	
	Jumlah (orang)	Persentase	Jumlah (orang)	Persentase	Jumlah (orang)	Persentase
Di Bawah 29 tahun	1	1,49	-	-	16	23,88
29 s/d 40 tahun	2	2,98	1	1,49	38	56,71
Di Atas 40 tahun	1	1,49	2	2,98	6	8,95

Hasil uji korelasi antara variabel usia dengan respon PKL terhadap kebijakan relokasi menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,203 dengan nilai signifikansi 0,099. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor usia PKL dengan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi. Artinya, interpretasi positif dan negatif menyebar pada semua kategori usia. Bila melihat relevansi dari faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi dengan obyek interpretasi itu sendiri yaitu kebijakan relokasi, maka terlihat jelas bahwa persoalan mendasar yang menentukan respon sesungguhnya terletak pada faktor ekonomi. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis secara dominan mempengaruhi pola pikir dan tindakan seseorang apabila belum terpenuhi secara memadai (terori hirarki kebutuhan Abraham Maslow).

Pendidikan

Tabel 23. Alokasi Interpretasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Interpretasi Positif		Interpretasi Ambivalens		Interpretasi Negatif	
	Jumlah (orang)	Persen-tase	Jumlah (orang)	Persen-Tase	Jumlah (orang)	Persen-tase
Tamat/Tdk tamat SMA	2	2,98	-	-	9	13,43
Tamat/Tdk tamat SMP	1	1,49	2	2,98	22	32,83
Tamat/Tdk tamat SD	1	1,49	1	1,49	29	43,28

Hasil uji korelasi antara tingkat pendidikan PKL dengan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,202 dengan nilai signifikansi 0,101. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan PKL dengan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi. Artinya, interpretasi positif dan negatif menyebar pada semua strata pendidikan. Dalam konteks penelitian ini, kapasitas interpretasi dan respon harus diletakkan secara proporsional menurut karakteristik hubungan emosional antar personal dalam kelompok penelitian. Sehingga, dalam komunitas PKL yang menjadi obyek penelitian ini, interpretasi dan respon lebih merepresentasikan bentuk interpretasi dan respon komunitas atau otoritas dari pada interpretasi dan respon opsional.

Faktor Paguyuban

Hasil uji korelasi antara faktor rekomendasi paguyuban dengan interpretasi PKL terhadap relokasi menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,232 dengan nilai signifikansi korelasi 0,059. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara rekomendasi paguyuban dengan interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi.

Tidak adanya hubungan antara rekomendasi PKL terhadap interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi mengandung pengertian bahwa ada beberapa PKL yang menginterpretasi kebijakan relokasi di luar rekomendasi sikap dari paguyuban PKL. Hasil uji korelasi tersebut juga merupakan konsekuensi dari kenyataan bahwa beberapa PKL

menyatakan bahwa paguyuban menyerahkan keputusan kesertaan relokasi kepada masing-masing PKL sesuai dengan kemampuannya. Namun demikian, mayoritas PKL tetap menyatakan bahwa rekomendasi sikap dari paguyuban menanggapi kebijakan relokasi adalah negatif.

Berkaitan dengan keberadaan paguyuban sebagai representasi kelompok PKL dalam membuat suatu keputusan kolektif, maka bentuk interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi dapat dianalisis sebagai peran kelompok dalam mengatur tata kelakuan anggotanya, seperti dalam bentuk rekomendasi bagaimana memaknai kebijakan relokasi.

Peran paguyuban dalam kegiatan usaha PKL Pasuruan sangat penting. Setiap wilayah memiliki koordinator-koordinator wilayah sendiri-sendiri sebagai penghubung sekaligus perpanjangan tangan paguyuban. Setiap ada PKL baru, maka ia baru dapat menempati lokasi tersebut dan berdagang dengan tenang apabila telah mendapatkan izin dari paguyuban. Jadi, dalam fungsi sosial dan keamanan usaha, peran paguyuban lebih besar dari pada peran Pemkot. Bagi PKL, mendapatkan izin dagang dari Pemkot tidak sulit, jauh lebih sulit mendapatkan izin dari paguyuban.

Hasil wawancara dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan yaitu Bapak Basuki terungkap, bahwa PKL-PKL baru yang bertambah setiap waktu di alun-alun Pasuruan adalah anggota keluarga dari PKL-PKL lama yang telah terlebih dahulu menempati alun-alun. Kelangkaan PKL baru yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan PKL lama dikarenakan sulitnya menembus batas-batas kelompok. Untuk datang ke paguyuban PKL saja, peneliti harus menyertakan salah satu PKL alun-alun Pasuruan.

Hasil wawancara dengan beberapa PKL yang mengaku memiliki kedekatan dengan paguyuban terungkap bahwa paguyuban PKL tidak setuju dengan kebijakan relokasi. Keputusan itu dibuat berdasarkan penjarangan terhadap berbagai aspirasi PKL terkait dengan relokasi. Sebagaimana halnya titik persoalan yang menjadi sorotan kebanyakan PKL, maka Paguyuban PKL menilai negatif kebijakan relokasi karena dinilai menetapkan biaya dan harga stand yang terlalu tinggi bagi PKL. PKL adalah pedagang berpenghasilan rendah, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menanggung semua biaya dan harga stand.

Faktor Pelayanan

Berdasarkan hasil kuisioner yang kemudian ditindak lanjuti dengan wawancara terhadap beberapa PKL terungkap, kebanyakan

PKL (50 orang/ 77,61 %) menerima pelayanan yang masih kurang berkenan dalam arti kurang profesional dari para Panitia Relokasi. Di antara pelayanan yang dianggap kurang profesional itu terkait dengan prosedur administrasi, seperti adanya diskriminasi pelayanan terhadap mereka yang tidak memiliki kedekatan dengan panitia atau pegawai Pemkot. Pelayanan yang kurang profesional tersebut dirasakan PKL pada saat pengajuan bukti persyaratan dari Pemerintah Kota Pasuruan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Pasuruan.

Alokasi interpretasi PKL terhadap relokasi yang didasarkan atas keluhan mereka terhadap kualitas pelayanan tetap menunjukkan keselarasan jumlah. Dari 50 orang (77,61%) yang mengutarakan buruknya kualitas layanan tersebut, semuanya menyatakan memaknai kebijakan relokasi sebagai ancaman bagi kelangsungan usahanya (interpretasi negatif).

Berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang dihasilkan dari faktor pelayanan dengan interpretasi PKL terhadap relokasi adalah 0,373 dengan nilai signifikansi 0,002. Oleh karena signifikansi di bawah 0,05 maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara faktor pelayanan dengan interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi (terima hipotesis alternatif). Artinya, semakin tidak memuaskan pelayanan yang diterima PKL, maka semakin negatif mereka menginterpretasikan kebijakan relokasi.

Faktor Fasilitas

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas PKL menilai fasilitas-fasilitas yang disediakan Pemkot di tempat tujuan relokasi masih kurang memadai. Alokasi pernyataan bahwa fasilitas di tempat tujuan relokasi kurang memadai sebanyak 49 orang (73,13 %) dengan nilai rata-rata respon 1,06. PKL yang menyatakan bahwa fasilitas di tempat tujuan relokasi cukup memadai sebanyak 16 orang (25,88 %) dengan nilai rata-rata respon 1,56. Sedangkan PKL yang menyatakan bahwa fasilitas di tempat tujuan relokasi memadai sebanyak 2 orang (2,98 %) dengan nilai rata-rata respon 3.

Hasil uji korelasi yang dilakukan guna mengetahui ada tidaknya hubungan antara faktor fasilitas dengan interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi menunjukkan besarnya koefisien korelasi adalah 0,307 dengan nilai signifikansi 0,012. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara faktor fasilitas usaha yang dipersiapkan Pemkot Pasuruan di

lokasi tujuan relokasi dengan interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi.

Hasil penelitian menunjukkan tentang keterkaitan antara faktor fasilitas dengan interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi di atas sesuai dengan prinsip *The Law Effect*, yaitu stimulus yang tidak menimbulkan kepuasan karena kurang terpenuhinya fasilitas-fasilitas yang diharapkan akan memperlemah hubungan S-I-R (interpretasi dan respon negatif).

Faktor Sosialisasi

Hasil survei dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas PKL, yaitu sebanyak 43 orang (64,17 %) menyatakan materi sosialisasi yang disampaikan Tim Penataan dan Pembangunan Kembali Pasar Poncol Kota Pasuruan kurang tepat. Dari 43 orang yang menyatakan hal tersebut, tidak satupun di antara mereka yang menginterpretasi kebijakan relokasi sebagai peluang bagi perkembangan dan kemajuan usaha, sebaliknya mereka semua menginterpretasi kebijakan relokasi sebagai ancaman bagi kelangsungan usaha.

Adapun PKL yang mengatakan bahwa materi sosialisasi yang disampaikan Tim Penataan dan Pembangunan Kembali Pasar Poncol Plaza cukup tepat sebanyak 17 orang (25,37 %). Sedangkan PKL yang menyatakan bahwa materi sosialisasi yang disampaikan Tim Penataan dan Pembangunan Kembali Pasar Poncol Kota Pasuruan tepat sebanyak 7 orang. 4 orang dari mereka ini menyatakan kebijakan relokasi adalah peluang bagi perkembangan dan kemajuan usaha sedangkan 3 orang lainnya menyatakan interpretasi ambivalens, dan 1 orang menyatakan ancaman bagi kelangsungan usaha.

Hasil data di atas kemudian diuji dengan uji Korelasi Rank Spearman dan menghasilkan koefisien korelasi 0,333 dengan nilai signifikansi 0,006. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara faktor sosialisasi dengan bentuk interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi.

Faktor Etnisitas

Uji korelasi yang dilakukan terhadap variabel etnis dengan interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,351. Adapun nilai signifikansi adalah 0,004. Oleh karena nilai signifikansi di bawah 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara faktor etnis PKL dengan interpretasi mereka terhadap kebijakan relokasi.

Hasil penelitian menemukan suatu kecenderungan bahwa kebanyakan dari PKL yang menginterpretasi kebijakan relokasi sebagai peluang pengembangan usaha adalah PKL beretnis Jawa dengan nilai rata-rata respon 1,8. Sedangkan PKL yang beretnis Madura lebih banyak menginterpretasi kebijakan relokasi sebagai ancaman bagi kelangsungan usahanya, dengan nilai rata-rata interpretasi 1,0. Untuk PKL beretnis lain (Bugis) memilih interpretasi ambivalens. Alokasi interpretasi PKL berdasarkan distribusi etnis dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 24. Alokasi Interpretasi PKL Berdasarkan Distribusi Etnis

Kategori Etnis	Interpretasi Positif		Interpretasi Ambivalens		Interpretasi Negatif	
	Jumlah (orang)	Persentase	Jumlah (orang)	Persentase	Jumlah (orang)	Persentase
Jawa	3	4,47	-	-	6	8,95
Lain-Lain (Bugis)	-	-	2	2,98	2	2,98
Madura	1	1,49	1	2,22	52	74,62

Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi adalah negatif. Dalam arti, mayoritas PKL yaitu sebanyak 60 orang (89,55 %) memaknai kehadiran kebijakan relokasi sebagai ancaman bagi kelangsungan usahamereka. Asumsi yang melandasi interpretasi negatif yaitu ketika PKL tidak mampu memenuhi persyaratan untuk kesertaan dalam relokasi, maka mereka berkeharusan untuk meninggalkan alun-alun Pasuruan, tempat yang selama ini digunakan sebagai lokasi usaha yang dinilai strategis. Adapun PKL yang menginterpretasi positif yaitu sebanyak 4 orang (5,97 %). Yaitu pemaknaan bahwa kebijakan relokasi merupakan peluang bagi perkembangan usaha. Asumsi yang melandasi interpretasi tersebut yaitu selama mereka berdagang di alun-alun, faktor keamanan dan kepastian status hukum usaha menjadi penghambat dalam upaya memaksimalkan usaha. Maka, kehadiran kebijakan relokasi mereka pandang sebagai satu alternatif jalan keluar untuk mengatasi penghambat upaya memaksimalkan/ memajukan usaha tersebut. Sedangkan PKL yang menginterpretasi kebijakan relokasi secara ambivalens sebanyak 3 orang (4,47). Mereka

ini memaknai kebijakan relokasi dalam keraguan di antara ancaman dan peluang bagi kelangsungan dan perkembangan usaha. Dengan satu asumsi yang melandasi interpretasi bahwa masih ada peluang kebijakan relokasi akan berubah dan realisasinya diperkirakan akan terus diundur mengingat Mall Poncol belum kunjung dibangun. Di samping itu, imbas dari perkembangan suksesi kekuasaan di tubuh Pemkot Pasuruan membuat sebagian kecil PKL menunggu janji-janji politik calon Wali Kota yang sering mereka dengarkan.

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi PKL terhadap Kebijakan Relokasi adalah: (1) Faktor Pengetahuan (pengetahuan tentang konsekuensi dari kebijakan, pengetahuan tentang aturan berdagang di lokasi baru, dan pengetahuan tentang strategi atau cara-cara menyasiasi usaha agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan ketat di lokasi baru), (2) faktor harapan atau kemauan, (3) faktor kemampuan (kemampuan strategi-teknis, kemampuan ekonomi), (4) faktor pelayanan, (5) faktor fasilitas, (6) faktor sosialisasi dan (7) faktor etnisitas.

Daftar Bacaan

- Abraham, Francis, M. 1982. *Modern Sociological Theory: An Introduction*, Oxford Univesity Press, Delhi.
- Ahmadi, A. 1991. *Kamus Lengkap Sosiologi*. CV. Aneka. Solo
- _____. 2002. *Psikologi Sosial*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta.
- Arifin. 2003. *Fenomena Sosial dalam Perspektif Fungsional Struktural, Konflik dan Interaksionisme Simbolik (Sebuah Pemahaman Awal)*, IKIP Budi Utomo, Malang.
- Arikunto, Suharsini. 1993. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Bagong & Kamaji. 2002. *Penataan PKL dan Bangunan Liar dalam Penelitian Kinerja Aparat Hukum di Pemerintah Kota Surabaya*, Pemkot Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota. Surabaya.
- Bagong, Suyanto, 1995. *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*, Airlangga University Press. Surabaya.
- . 1996. *Perebutan Ruang di Perkotaan dan Pembenaarannya*, dalam Prisma, Quo Vadis Undang-Undang Pokok Agraria. LP3ES. Jakarta.
- Bappeda Kota Pasuruan dan Lakpesdam NU Kota Pasuruan. 2004. *Laporan Penelitian Studi Relokasi Pedagang Kaki Lima Kota Pasuruan*, Pemkot Pasuruan.
- Barth, Predrik. 1988. *Kelompok Entik dan Batasannya*, UI Press. Jakarta.
- Blummer, Herbert. 1969. *Symbolik Interaksionism: Perspekticer and*

- Method*. Eagle Wood Cliffs. N). Prentice-Hall. inc.
- Brannen, Yulia. *Mixing Method Qualitative and Quantitative Research*, Evabury Aldershot, Brookfield Lisa, Hongkong, Singapura, Sydney, 1993.
- Bryant, Coralie dan Louis D White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Cambell, Tom. 1994. *Seven Theories of Human Society*, Budi Hardiman, Kanisius (Penerjemah), Yogyakarta.
- Christoper G.A. Bryant & David Jary (ed). 1991. *Gaddin's Theory of Strukturation: A Critical Apreciation*, London & New York: The Innternational Library of Sociolog.
- Craib, Ian. 1992. *Modern Social Theory: From Parsons to Habermas*, T. Effendi, (Penerjemah) CV. Rajawali. Jakarta.
- Dahuri. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Kedua*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka. Jakarta.
- De Soto, Hernando. 1991. *Masih Ada Jalan Lain, Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga*, Masri Maris (Penerjemah). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Devas, N. dan Rakodi. (ed). 1993. *Managing Fast Growing Cities : New Approaches to Urban Planning and Management In The Developing World*, Longman Scientific & Technical. New York.
- Ekanandar, Akbari. 2000. *Interaksi Sosial Etnis Cina dengan Jawa (Studi Kasus di Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kotamadya Malang*, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah. Malang
- Gema, Delta. Nomor 05 tahun 2000, "Pentingnya Aspek-aspek Perencanaan Dalam Upaya Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Sidorajo".
- Giddens, Anthony. 2003. *The Constitution of Society. Teori Strukturası untuk Analisis Sosial*, Adi Loka Sujono (penerjemah), Pedati. Pasuruan.
- Hanurawan, Fattah. 2001. *Dasar-Dasar Psikologi Sosial*, Triustminat Press. Malang.
- Hergenhahn, Olson. 1995. *An Introduction To Theories Of Learning (Sixth Edition)*, Upper Saddle River, New Jersey.
- Hidayat. 1978. *Perkembangan Sektor Informal dalam Pembangunan Nasional: Masalah dan Prospek*, Pusat Penelitian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, Bandung.
- Islamy, M. Irfan. 1996. *Perilaku Kekuasaan Pemimpin Lokal*, Program

Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

- Johnson, D. Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1 & 2*, Robert M.Z.Lawang (Penerjemah), Gramedia Pustaka Islam. Jakarta.
- Kantor Polisi Pamong Praja. 2004. *Permintaan Data PKL tahun 2004*, Pemkot Pasuruan.
- Kerlinger, Fred N. 1973. *Foundation OF Behavior Research*, New York.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lauer, Robert, H. 1993. *Perspective on Social Change*, Alimandan (Penerjemah), PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Makmun, Abin Syamsuddin. 2002. *Psikologi Kependidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. (Penyunting) 1985. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Yayasan Obor Indonesia dan Gramedia, Jakarta.
- Maramis, W.F. 1990. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga University Press. Surabaya.
- Mayer, Robert. R. & Earnest Green Wood. 1984. *Rancangan Penelitian Sosial*, Ihsan Suhadi (Penerjemah), CV. Rajawali, Jakarta.
- Mazmanian, D.A. dan P.A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman and Company. Blenview. Illinois.
- Meter, Donald. S. Van and Carle, Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process a Conceptual Frame Work In Administration an Societ*, Sage Publication, New York.
- Miles, Metthew B and Huberman A. Michael. 1992. *Qualitatif Data Analysis*, Sage Publication Inc.
- Mirza, Iskandar. 1997. *Spesialisasi Kebijakan Publik: Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang)*, Program Studi Administrasi Negara Brawijaya, Malang.
- Moleong, Lexy, J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulayana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muslimin. 2002. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, UMM Press, Malang.
- Nazir. 2003. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 2003.
- Paripurna, Megalatri. 2004. *Persepsi PKL Terhadap Kebijakan Tentang Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Sidoarjo*, Program Pascasarjana

- Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Poloma, Margaret. 2000. *Teori Sosiologi Kontemporer*, Yasogama (Penerjemah), PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Pemerintah Kota Pasuruan. 2002. *Salinan Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)*, Pemkot Pasuruan.
- Rachbini dan Hamid. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan*, LP3ES. Jakarta.
- Ritzer, George. 1982. *Socilogy Experiencing a Changing Society*, Bonston. Allyn and Bacon, Inc.
- _____. 2002. *Sosiologi Ilmu Pngetahuan Berparadigma Ganda*, Aliman dan (Penerjemah). Grafindo Persada. Jakarta.
- Rosenau. 1997. *Memahami Perliku Orang Lain*, Bina Cipta. Jakarta.
- S. Susanto, Astrid, Phil. 1984. *Sosiologi Pembangunan*, Binacipta, Jakarta.
- Sarwono, S.W. 1995. *Psikologi Lingkungan*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Teori Sosiologi tentang Perilaku Masyarakat*, PT.Ghalia Indonesia.
- . 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyanto. 2002. *Analisis Statistika Sosial*, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang.
- Sugiyono, Wibowo. 2004. *Statistika Penelitian dan Aplikasinya dengan SPSS 10.00 for Windows*, Alfabeta,
- Sugiyono. 2003. *Statistika untuk Penelitian*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sujarwati, Nylam. 2002. *Integrasi Antar Etnik Arab dan Madura dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kotamadya Surabaya)*. Pascasarjana Unibersitas Muhammadiyah. Malang.
- Tadjuddin Noer Effendi. 1995. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Tadjuddin, Noer & Manning, Chris. 1985. *Organisasi, Peraturan dan Pengusahaan "Sektor Informal di Kota": Pedagang Kaki Lima di Vali Columbia dan Asia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Tangri, Shanti, 1978. *Urbanization, Political Stability and Economic Growth*, dalam, *Political Power and Communication in Indonesia*, University of California Press. USA.
- Tim Penataan dan Pembangunan Kembali Pasar Poncol Kota Pasuruan. 2004. *Tujuan dan manfaat Pembangunan Pasar Poncol Kota Pasuruan: Sosialisasi dengan Pedagang Lama dan PKL Pasar*

Poncol Kota Pasuruan, Pasuruan.

Tim Program Pascasarjana. 2004. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.*

Solichin. Abdul Wahab. 1994. *Kebijakan Publik dan Pembangunan, FIA Universitas Brawijaya, Malang.*

1994. *Esensi Nilai Dalam Kebijakan, Perbincangan Teoritikal, dalam Z.A. Achmady dkk. 1996. Kebijakan Publik dan Pembangunan, Malang. IKIP Malang dan FIA Universitas Brawijaya.*

Wali Kota Pasuruan. 2001. *Salinan Keputusan Walikota Pasuruan, Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, Pemkot Pasuruan.*

Wibawa Samudra, Purbokusumo, Yuyun dan Pramusinta, Agus. 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.*

Wirahadikusuma, Miftah. 1991. *Sektor Informal Sebagai Bumper pada Masyarakat Kapitalis, Prisma No.5, LP3ES, Jakarta.*